



## **Blue Economy Sebagai Basis Strategi Kebijakan Ekspor Industri Perikanan Indonesia di Kawasan Asia Tenggara**

Selsya Shafa Khairunisaa

Universitas Padjadjaran, Indonesia; selsya20001@mail.unpad.ac.id

Astricta Amalia Putri

Universitas Padjadjaran, Indonesia; astricta20001@mail.unpad.ac.id

Deasy Silvy Sari

Universitas Padjadjaran, Indonesia; deasy.silvy@unpad.ac.id

| Submit: 19-04-2024 | Accept: 09-08-2024 | Publish: 13-08-2024 |

### **Keywords**

*Blue economy, export, fisheries, policy, strategy, Southeast Asia*

### **ABSTRACT**

*As a maritime nation, Indonesia can bolster its economy through the fisheries sector by implementing the blue economy framework. This study highlights four key aspects crucial to fisheries export policies based on the blue economy: (1) innovation and technology, (2) ecosystem and environmental sustainability, (3) support for fishermen and fish farmers, and (4) research and development. Using a qualitative case study approach with secondary data, the research shows that these aspects have been incorporated into Indonesia's fisheries export strategies. However, the focus on Southeast Asia remains limited, and further advocacy and collaboration are needed to enhance policy implementation and benefit all economic actors.*

### **Kata Kunci**

Asia Tenggara, *blue economy*, ekspor, kebijakan, perikanan, strategi.

### **ABSTRAK**

Sebagai negara maritim, Indonesia dapat memperkuat ekonominya melalui sektor perikanan dengan menerapkan kerangka ekonomi biru.. Penelitian ini menyoroti empat aspek penting dalam kebijakan ekspor perikanan berbasis ekonomi biru: (1) inovasi dan teknologi, (2) keberlanjutan ekosistem dan lingkungan, (3) dukungan bagi nelayan dan petani ikan, serta (4) penelitian dan pengembangan. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif dan data sekunder, penelitian ini menunjukkan bahwa aspek-aspek tersebut telah dimasukkan ke dalam strategi ekspor perikanan Indonesia. Namun, fokus pada kawasan Asia Tenggara masih terbatas, dan diperlukan advokasi serta kolaborasi lebih lanjut untuk meningkatkan implementasi kebijakan dan memberikan manfaat bagi semua pelaku ekonomi.

## PENDAHULUAN

Tercatat bahwa 80% dari perdagangan global di dunia merupakan hasil dari perairan di mana pelayaran internasional sangat penting bagi negara untuk mengakses pasar internasional. Konsep *blue economy* merupakan konsep yang baru setelah munculnya *green economy*. *Blue economy* pada dasarnya sebuah *framework* atau kerangka dalam menjamin kelestarian sumber daya dan lingkungan pesisir hingga laut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di industri kelautan dan perikanan (Setiyowati, Nugroho, & Halik, 2022). Indonesia sebagai negara maritim tentunya mampu menyusun strategi untuk memperkuat perekonomian melalui sektor perikanan, di mana erat kaitannya dengan implementasi *blue economy* yang telah dicanangkan sejak masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono melalui RPJPN dan RPJMN 2005 - 2025 (Polanunu & Kusumaningrum, 2022).

Tidak hanya Indonesia, negara-negara di Asia Tenggara juga menerapkan *framework blue economy* untuk memperkuat perekonomian yang mereka miliki. Terlebih dengan kondisi laut yang kurang lebih sama dengan Indonesia. Berbagai kerja sama pun telah dicanangkan dengan dasar *blue economy* tersebut, misalnya dengan negara anggota APEC yang berfokus pada kerja sama di bidang perairan, energi, dan pasokan pangan (Pradana, 2021). Namun, tentu saja Indonesia masih tetap unggul dalam segi diversifikasi biota laut yang dimiliki, membuat Indonesia memiliki komoditas terdepan di antara negara-negara di Asia Tenggara. IEA dan OECD juga menyebut bahwa Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang diharapkan dapat berkembang dalam satu dekade ke depan dan salah satu dari 10 negara yang memiliki potensi pasar terbesar (Razladova & Nyoko, 2022). Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana Indonesia dapat mengembangkan potensi tersebut melalui sumber daya yang ada. Elia dan Indrajaya (2022) sendiri menyebut bahwa salah satu kunci kesuksesan ekonomi ditentukan pada seberapa banyak pengetahuan baru maupun produk inovatif yang dikeluarkan. Laut yang mengambil alih lebih dari 60% wilayah Indonesia tentu saja sudah membuktikan seberapa besar potensi Indonesia, terlebih ketika kita mengingat bahwa berbagai sektor penting ekonomi terjadi di wilayah laut itu sendiri.

Indonesia yang merupakan negara dengan produksi sektor perikanan yang besar diperoleh dari karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki lautan yang luas. Pada tahun 2010, Indonesia memproduksi sebanyak 10,83 juta ton ikan dan menjadi produsen ikan terbesar di Asia Tenggara (ASEAN). Lalu pada bulan ketiga tahun 2022, produksi ikan Indonesia mencapai 18.45 juta ton. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah membuktikan bahwa tahun 2022 ini nilai ekspor perikanan mencapai USD 5,71 miliar dan nilai impor sebesar USD 0,64 miliar dan jika dihitung dalam persen, sektor perikanan telah tumbuh 10,66% dibanding tahun 2021. Nilai ini tidak hanya didapatkan dari sisi makro melalui ekspor ke AS, Tiongkok, Jepang dan negara-negara ASEAN, namun KKP telah menunjang para pelaku UMKM pengolah dan pemasar hasil perikanan, pembudidaya serta nelayan melalui kredit usaha rakyat (KUR) (HUMAS DITJEN PDSPKP, 2022).

Kawasan ASEAN menjadi salah satu konsumen terbesar Indonesia dalam industri perikanan. Pada kurun waktu Januari - November tahun 2022, ASEAN merupakan konsumen keempat terbesar yang berkontribusi terhadap pembelian produk perikanan senilai \$651 Juta (Herman, 2022). ASEAN juga menjadi kawasan dengan konsumsi ikan yang tinggi dengan rata-rata konsumsi per kapita sebesar 33.4 kg pada tahun 2013 (Chan, et al., 2017). Konsumsi yang besar tersebut dikarenakan jumlah tangkapan ikan yang diproduksi oleh negara-negara ASEAN dijadikan sebagai produk yang dikonsumsi dengan jumlah total sebanyak 95% dari total penangkapan (Chan, et al., 2017). Dengan jumlah tersebut, ASEAN menjadi kawasan yang menjanjikan bagi Indonesia untuk memfokuskan dirinya meningkatkan perekonomian melalui sektor perikanan.

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai *blue economy* di Indonesia dikaji dari perspektif yang berbeda-beda. Menurut Adiprayoga & Samiaji (2021), situasi masyarakat pesisir di pulau Sumatera memiliki potensi serta kesempatan untuk mendukung ketahanan pangan secara nasional melalui pemanfaatan konsep *blue economy*. Hal ini dapat dicapai apabila pemerintah mampu memfasilitasi dan

membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan perekonomian di setiap provinsinya. Selain itu, pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan dapat dilakukan melalui pengelolaan sumber daya perikanan berbasis masyarakat (PSBM) maupun integrasi antara masyarakat dan pemerintah. Berbeda dengan Adiprayoga & Samiaji (2021), Rudi (2023) berpendapat bahwa mitigasi bencana dapat diatur melalui undang-undang atau kebijakan publik tertulis lainnya yang berbasis *blue economy*. Aspek-aspek yang bisa dioptimalkan antara lain adalah manajemen area pesisir dan laut, manajemen limbah plastik, sistem peringatan tsunami, konservasi terumbu karang, pengembangan infrastruktur anti-bencana, manajemen hasil perikanan, dan pengembangan teknologi dan inovasi yang berkelanjutan. Dari perspektif perekonomian, Wu et al. (2023) menjelaskan bahwa Global Maritime Axis (GMA) di Indonesia mampu meningkatkan prospek diplomasi ekonomi di wilayah Asia Tenggara dengan mengadaptasi konsep *blue economy*. Di bidang impor, Aris et al. (2022) berpendapat bahwa kebijakan impor garam yang dilakukan oleh Indonesia dapat menjadi kesempatan maupun ancaman bagi potensi ekonomi Indonesia karena nyatanya Indonesia seharusnya masih mampu untuk memproduksi garam sendiri. Terakhir, Nasution & Wicaksono (2023) menjelaskan bahwa kondisi ekonomi politik Indonesia di bidang kelautan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai mencapai puncaknya ketika Kementerian Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Susi Pudjiastuti. Di bawah kepemimpinannya, kebijakan yang dikeluarkan oleh Susi Pudjiastuti dinilai sangat ketat dan tegas terhadap berbagai permasalahan perikanan dan kelautan di Indonesia. Susi Pudjiastuti pun dinilai mampu mengimplementasikan konsep *blue economy* dalam kebijakan perikanan dan kelautan di Indonesia dengan baik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, konsep *blue economy* dinilai mampu dijadikan sebagai basis konsep dalam perumusan strategi kebijakan ekspor perikanan Indonesia. Sebagai salah satu kawasan dengan konsumen terbesar Indonesia dalam sektor perikanan, Asia Tenggara menjadi fokus wilayah yang akan diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis seberapa jauh para *policymakers* dan *stakeholder* dalam menerapkan konsep *blue economy* untuk menunjang efektivitas kebijakan ekspor perikanan Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang mampu berkontribusi dalam melanjutkan implementasi konsep *blue economy* dalam sebuah kebijakan luar negeri di sektor ekonomi dalam studi Hubungan Internasional khususnya mengenai ekspor. Selain itu, pengkajian *blue economy* dalam kebijakan luar negeri ini diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa HI, akademisi, *stakeholder* perdagangan internasional serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan ekspor perikanan di Indonesia.

## **KERANGKA KONSEPTUAL**

### ***Kebijakan Luar Negeri***

Berdasarkan Smith (1986) dan Bojang (2018) keberadaan kebijakan luar negeri dalam studi hubungan internasional telah dimulai sejak tahun 1954 dalam publikasi pertama Snyder, Bruck dan Sapin dalam buku *Decision-Making as an Approach to the Study of International Politics*. Selain itu, pembentukan PBB dan masa dekolonisasi yang membentuk banyak negara berdaulat baru membuat sebuah produk kebijakan yang ditujukan sebagai jembatan hubungan antar negara. Konsep kebijakan luar negeri mencoba memahami negara sebagai anggota fenomena internasional yang mencoba melihat sifat, perilaku, dengan fokus pada proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kebijakan luar negeri adalah salah satu produk sistem politik internasional yang harus dimiliki dalam kondisi hubungan internasional yang 'anarki'. Berdasarkan Charles Hermann dan Deborah Gerner dalam (Bojang, 2018) dan Ziring, Plano dan Olton (1995) kebijakan luar negeri merupakan sebuah hasil dari formulasi dan implementasi negara dalam mencapai tujuan serta kepentingan nasional dengan bentuk pernyataan, strategi atau tindakan. Kebijakan ini dikeluarkan mampu berasal dari hasil prakarsa negara itu sendiri maupun sebagai reaksi terhadap aktivitas yang dilakukan oleh negara lain.

Dalam merumuskan kebijakan luar negeri menurut (Gimba & Ibrahim, 2018) terdapat lima langkah yang harus dilakukan. Diantaranya adalah sebagai berikut:

**1) Asesmen kondisi politik internasional dan domestik**

Kebijakan luar negeri dirumuskan dan diimplementasikan sesuai dengan kondisi politik internasional dan domestik. Kedua kondisi ini perlu dipahami oleh negara untuk menentukan kebijakan yang akan dipilih. Contohnya, negara dimungkinkan untuk merespons krisis internasional, tantangan perdagangan internasional, turunnya kurs, maupun kondisi politik, ekonomi, dan sosial lainnya.

**2) Goal setting**

Penentuan kebijakan perlu diselaraskan dengan kepentingan dan tujuan nasional. Tujuan ini tidak hanya berdampak secara nasional saja, tetapi mampu berkontribusi secara internasional.

**3) Pertimbangan mengenai pilihan kebijakan**

Negara harus menentukan pilihan kebijakan apa yang tersedia untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan berdasarkan kondisi nasional dan internasional. Hal ini melibatkan penilaian kapasitas negara untuk menerapkan pilihan kebijakan dan penilaian konsekuensi dari setiap pilihan kebijakan.

**4) Keputusan dalam menentukan aktor yang menyusun kebijakan**

Keputusan kebijakan luar negeri akan diambil di beberapa tingkatan dalam pemerintahan. Keputusan kebijakan luar negeri biasanya disusun oleh lembaga eksekutif, yaitu kepala negara, kepala pemerintahan, kabinet, atau menteri.

**5) Implementasi kebijakan terpilih**

Setelah opsi kebijakan luar negeri dipilih dan keputusan telah dibuat, maka kebijakan tersebut harus dilaksanakan. Kebijakan luar negeri umumnya dilaksanakan oleh lembaga khusus kebijakan luar negeri dari birokrasi negara, seperti Kementerian Luar Negeri. Fungsi lainnya pun dapat berperan dalam melaksanakan kebijakan luar negeri, seperti departemen untuk perdagangan, pertahanan, dan sosial.

**Kebijakan Ekonomi Luar Negeri**

Pengembangan konsep *foreign economic policy* atau kebijakan ekonomi luar negeri terdapat dalam pendapat David H. Bearce dalam buku *The Oxford Handbook of International Political Economy*. Bearce mengkonstruksi posisi kebijakan ekonomi luar negeri dalam Hubungan Internasional dalam bentuk tabel sebagai berikut.

**Tabel 1. Organizing IR by Subfield**

	International Political Economy	International Conflict/Security
International Organization		
Foreign Policy	<b>Foreign Economic Policy</b>	

Sumber: (Bearce, 2021)

Konstruksi ini menurut Bearce sangat berguna untuk memahami kebijakan ekonomi luar negeri. Dapat dipahami bahwa *domain* dari kebijakan ekonomi luar negeri merupakan keberlanjutan dari konsep *international political economy* (IPE) dan kebijakan luar negeri sendiri terfokus bagaimana kebijakan eksternal dapat mempengaruhi negara. Maka, kebijakan ekonomi luar negeri sendiri akan mempelajari bagaimana perbedaan negara dalam menyusun kebijakan dagang mereka, menentukan kurs, dan kebijakan imigrasi serta bagaimana negara konsisten dengan siapa saja aktor yang akan terkait dalam perekonomian tersebut. Sedangkan perbedaannya dengan IPE adalah mengenai efektivitas dari WTO, desain perjanjian dagang, pengaruh IMF/World Bank secara struktural, dan lain sebagainya. Oleh karena itu para peneliti kebijakan ekonomi luar negeri akan memfokuskan di bidang implementasi

perdagangan internasional, investasi eksternal, pemberian modal, nilai tukar, dan kebijakan imigrasi di tingkat negara karena kebijakan-kebijakan ini ditetapkan oleh pemerintah nasional (Bearce, 2021). Selain itu, fokus dari kebijakan ekonomi luar negeri ini akan berbeda implementasinya karena lima determinan tersebut dipengaruhi oleh ‘*individual-level preference*’ yang berbeda di setiap negaranya. Penelitian ini akan melihat bagaimana kebijakan ekspor perikanan berbasis *blue economy* ini dipengaruhi oleh ‘*individual-level preference*’ yang terjadi dalam ekosistem industri perikanan Indonesia.

### **Blue Economy**

Istilah *blue economy* atau “BE” pertama kali muncul pada tahun 2009 tepat pada kongres *the Senate Committee on Commerce, Science, and Transportation of the United States*. Dalam kongres ini dijelaskan pentingnya *blue economy* bagi perekonomian Amerika Serikat dan diskusi mengenai perubahan iklim. Lalu, pada tahun yang sama, *International Symposium on Blue Economy Initiative for Green Growth* di Korea memperjelas penggunaan konsep *blue economy* sebagai konsep dalam menggunakan sumber daya laut dengan cara menghargai lingkungan serta mengevaluasi aktivitas bisnis di dalamnya. Selanjutnya, buku *The Blue Economy* (Pauli, 2010) dan *United Nations Conference on Sustainable Development 2012* di Rio de Janeiro menjadi pendukung utama perkembangan konsep BE.

Berdasarkan World Bank (2013), Costa et al (2019), Phelan (2020), Graziano (2019) konsep *blue economy* merupakan sebuah kerangka dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang memadukan antara perkembangan yang terjadi di laut dan di darat melalui penekanan optimalisasi penggunaan teknologi guna meningkatkan sumber daya yang ada di laut. Melalui *blue economy*, aktivitas konservasi, penambangan minyak, *bioprospection*, produksi energi terbarukan serta transportasi laut menjadi fokus yang dapat meningkatkan perekonomian suatu negara. Dengan memaksimalkan sumber daya dan potensi yang berasal dari laut, maka akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan diversifikasi produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dasar pembentukan kebijakan ekonomi dalam bentuk ekspor di sektor perikanan berbasis *blue economy* dapat dilakukan dengan berdasar pada *blue economy in fisheries management model*. Menurut model ini, terdapat empat aspek yang harus dilibatkan dalam kebijakan ekspor perikanan, yaitu (1) *innovation and technology*, (2) *ecosystem and environment sustainability*, (3) *alignments in fishermen and fish farmers* dan (4) *research and development* (Sari & Muslimah, 2020).

### **METODE RISET**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia di bidang ekonomi khususnya ekspor di sektor industri perikanan untuk beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yang dinilai telah berbasis konsep *blue economy*. Metode ini dipilih karena dengan menggunakan metode kualitatif, kumpulan data mengenai kebijakan-kebijakan luar negeri ekonomi yang telah dikeluarkan oleh Indonesia untuk mendukung ekspor sektor perikanan bagi negara-negara di Asia Tenggara dapat dianalisis secara mendalam apakah kebijakan tersebut telah berbasis konsep *blue economy* maupun tidak. Kebijakan luar negeri digunakan sebagai alat analisis karena kegiatan ekspor maupun impor termasuk dalam peran negara dalam menentukan kebijakan yang sesuai untuk dilakukan dalam mencapai kepentingan nasional secara ekonomi. Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif, yaitu dengan menggambarkan data yang didapatkan kemudian dianalisis berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung saat ini (Creswell & Creswell, 2018).

Data- data yang akan digunakan adalah berupa data sekunder mulai dari buku, artikel jurnal, berita (khususnya yang ditemukan secara daring), arsip dalam bentuk laporan kegiatan, regulasi, data statistik, infografis, perjanjian, dan lain sebagainya. dengan studi literatur dan penelusuran dari internet. Pengumpulan data akan dilakukan dengan studi literatur. Teknik ini digunakan karena dalam proses

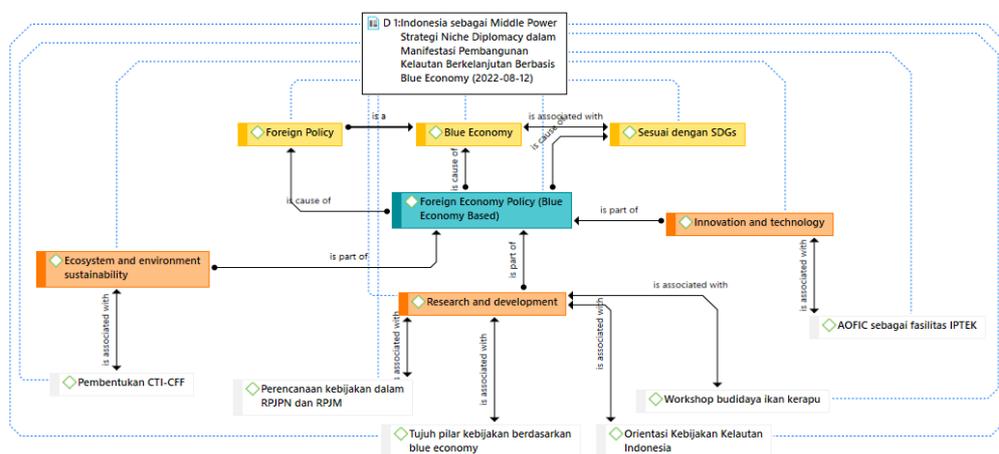
pengumpulan data dilakukan pencarian kata kunci, subjek, lalu pencarian mengenai buku maupun artikel ilmiah yang relevan sehingga akan menghasilkan analisis lanjutan terhadap data-data yang telah dilakukan. Penggunaan internet digunakan sebagai penunjang studi literatur karena sumber-sumber data yang akan digunakan berasal dari internet dan dapat diakses kapan saja serta jumlah datanya tidak terbatas (Given, 2008). Data yang sudah terkumpul akan dianalisis dengan bantuan aplikasi analisis data kualitatif yaitu Vosviewer dan Atlas.ti. Terakhir, akan dilakukan validasi data melalui triangulasi sumber data dan melewati pengecekan oleh supervisor penelitian untuk memastikan data yang dikumpulkan masih terbaru dan relevan dengan fokus waktu fenomena yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil *Intercoding* Data Kualitatif dengan Atlas.ti

#### *Analisis Interkoding Artikel “Indonesia sebagai Middle Power: Strategi Niche Diplomacy dalam Manifestasi Pembangunan Kelautan Berkelanjutan Berbasis Blue Economy”*

Gambar 1. Hasil Analisis *Intercoding* Artikel

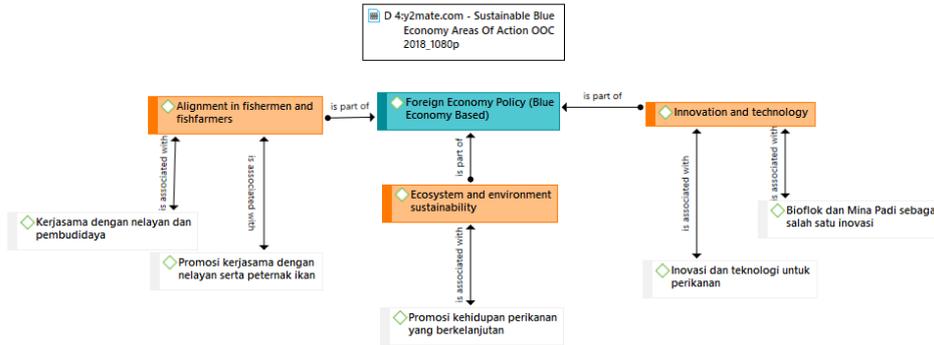


Sumber: Diolah oleh penulis

Berdasarkan hasil interkoding artikel “Indonesia sebagai Middle Power Strategi Niche Diplomacy dalam Manifestasi Pembangunan Kelautan Berkelanjutan Berbasis Blue Economy” (Polanunu & Kusumaningrum, 2022) ditemukan data-data mengenai bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia di bidang kelautan disusun menggunakan konsep *blue economy* melalui berbagai kegiatan dan kerja sama yang dilakukan Indonesia dengan negara lain (Lihat Gambar 1). Dipilih beberapa paragraf serta kalimat yang memuat bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia mengenai ekonomi berbasis *blue economy* yang berguna bagi sektor perikanan adalah antara lain pembentukan CTI-FFF, perencanaan kebijakan kelautan berbasis *blue economy* dalam RPJPN dan RPJM, membentuk tujuh pilar kebijakan berdasarkan *blue economy*, melakukan *workshop* budidaya ikan kerapu, memiliki orientasi kebijakan kelautan Indonesia serta melakukan kerja sama dengan APEC melalui AOFIC untuk menyediakan fasilitas IPTEK di sektor perikanan. Beberapa tindakan yang dilakukan oleh Indonesia tersebut termasuk ke dalam indikator kebijakan luar negeri ekonomi berbasis *blue economy* yaitu (1) *ecosystem and environment sustainability*, (2) *research and development* serta (3) *innovation and technology*.

***Analisis Interkoding Video “Sustainable Blue Economy Areas of Action OOC 2018”***

**Gambar 2. Hasil Analisis Intercoding Video**

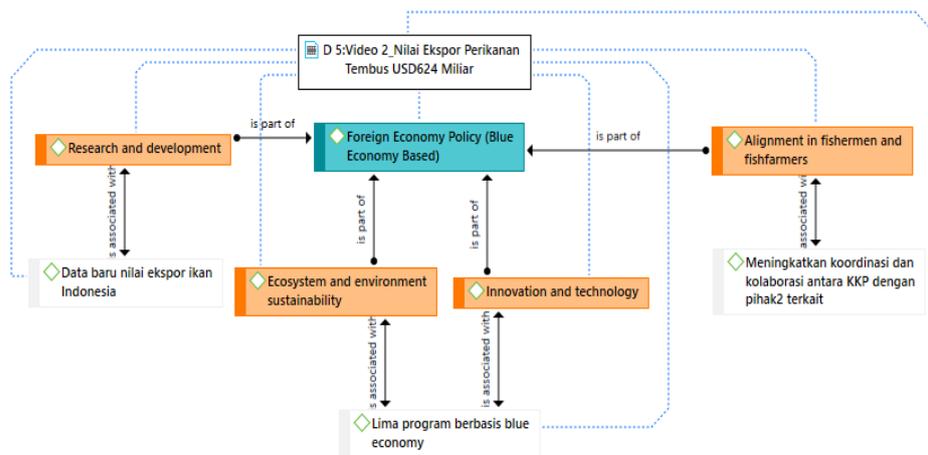


Sumber: Diolah oleh penulis

Berdasarkan hasil interkoding Video 1 “Sustainable Blue Economy Areas of Action OOC 2018” (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2018) ditemukan data-data mengenai hal apa saja yang telah dilakukan oleh Indonesia khususnya oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengoptimalkan penggunaan konsep *blue economy* dalam meningkatkan perekonomian melalui sektor kelautan (Lihat Gambar 2). Dengan mengedepankan ekonomi biru yang berkelanjutan, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui video ini telah meningkatkan inovasi dan teknologi untuk sektor perikanan seperti dengan adanya Bioflok dan Mina Padi sebagai salah satu inovasi dalam teknologi perikanan, melakukan kerja sama dengan nelayan juga peternak ikan, dalam contoh di video bersama para peternak dan pengelola tambak udang. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah berupaya untuk mempromosikan kehidupan sektor kelautan yang berkelanjutan baik dalam meningkatkan kualitas kebersihan laut, serta meningkatkan diversitas jenis ikan yang akan digunakan sebagai komoditas ekspor.

***Analisis Interkoding Video “Nilai Ekspor Perikanan Tembus USD 624 Miliar”***

**Gambar 3. Hasil Analisis Intercoding Video 2**

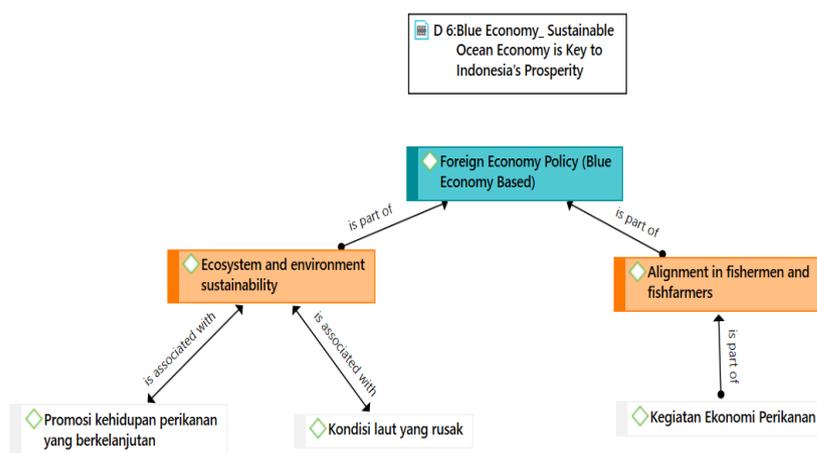


Sumber: Diolah oleh penulis

Berdasarkan hasil interkoding Video 2 “*Nilai Ekspor Perikanan Tembus USD 624 Miliar*” (IDX Channel Insight, 2023) ditemukan poin-poin mengenai ekspor perikanan Indonesia dimulai dari data baru secara angka mengenai nilai ekspor ikan Indonesia, serta bagaimana Kementerian Kelautan dan Perikanan merancang lima program berbasis *blue economy* yaitu penambahan luas kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya laut pesisir maupun darat secara berkelanjutan, pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta fokus pembersihan sampah plastik di laut (Lihat Gambar 3). Kelima program tersebut termasuk ke dalam indikator *ecosystem and environment sustainability* dan *innovation and technology*. Selain itu, dalam indikator *alignment in fisherman and fish farmers*, Indonesia akan meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan pihak-pihak terkait yang tergabung dalam alur ekspor perikanan di Indonesia secara menyeluruh.

### Analisis Interkoding Video “Blue Economy: Sustainable Ocean Economy is Key to Indonesia’s Prosperity”

Gambar 4. Hasil Analisis Interkoding Video 2

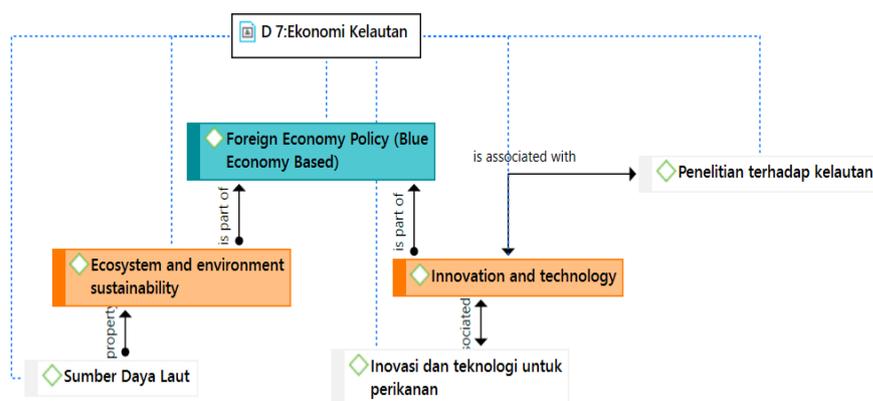


Sumber: Diolah oleh penulis

Berdasarkan hasil interkoding video 3 “*Blue Economy: Sustainable Ocean Economy is Key to Indonesia’s Prosperity*” (World Bank, 2021), ditemukan informasi mengenai pentingnya laut Indonesia terutama dalam bidang kegiatan ekonomi perikanan yang mana beririsan langsung dengan para nelayan Indonesia (Lihat Gambar 4). Hal ini juga tentunya berkaitan dengan keberlanjutan dari ekosistem dan lingkungan yang ada. Oleh karena itu, video tersebut sangat menekankan poin bagaimana kondisi laut yang pernah terjadi maupun yang ada saat ini lalu mempromosikan kehidupan perikanan yang berkelanjutan dengan menjaga kehidupan laut yang ada.

## **Analisis Interkoding Foto “Mendefinisikan Ekonomi Kelautan Indonesia”**

**Gambar 5. Hasil Analisis Interkoding Gambar**



Sumber: Diolah oleh penulis

Berdasarkan hasil interkoding foto 1 yang didapatkan melalui tulisan “Mendefinisikan Ekonomi Kelautan Indonesia” (Nana, 2021) dapat dilihat secara sederhana arti dari *Blue Economy* itu sendiri (Gambar 5). Dimana dalam foto tersebut dijelaskan bahwa dalam ekonomi laut (atau ekonomi biru) tentunya merupakan aktivitas ekonomi yang bergantung pada laut dan sumber dayanya. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keberlangsungan dari laut itu sendiri. Tidak hanya memikirkan tentang aktivitas ekonomi, dalam agenda *Blue Economy*, inovasi dan teknologi untuk memastikan keberlanjutan dari ekosistem yang ada menjadi determinan yang harus diperhatikan. Teknologi seperti tambak ikan juga akan lebih mengefisienkan kegiatan ekonomi laut itu sendiri. Tidak hanya itu, terlihat juga bahwa terus dilakukannya penelitian terhadap laut untuk memastikan inovasi terus lahir dengan satu tujuan dari *framework Blue Economy*.

### **Peran Ekspor dalam Pertumbuhan Industri Perikanan Indonesia**

Indonesia yang merupakan negara kepulauan tentu membuat perikanan menjadi salah satu penggerak utama perekonomian negara. Pemerintah Indonesia juga menyebutkan bahwa melalui ekspor, subsektor perikanan di bawah sektor pertanian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Ambari, 2019). Hal tersebut dapat tercapai karena ekspor dapat mengalokasikan sumber daya yang efisien, penggunaan kapasitas produksi skala besar, dan perkembangan teknologi dalam upaya bersaing di pasar luar negeri. Adapun komoditas utama ekspor Indonesia dalam sub-sektor perikanan adalah udang, ikan tuna, cumi-cumi, gurita, rumput laut, dan kepiting. Pada tahun 2022, nilai ekspor produk perikanan yang ada mencapai Rp84,60 triliun yang mana naik 10,66% dibandingkan pada tahun 2021 (Sutrisno, 2023). Dengan nilai tersebut, Indonesia juga terus mempromosikan *branding* yang telah dibuat yaitu “*Indonesia Seafood: Naturally Diverse*” dan bahkan beberapa komoditas memiliki *branding* produk sendiri seperti “*Indonesia Seaweed, Natural Binding Solutions to the World*” untuk rumput laut dan “*Indonesia Tuna, Sustainable by Tradition: One-by-One*” untuk ikan tuna. Selain komoditas yang telah disebutkan, tercatat adanya total 69 klasifikasi komoditas dengan ratusan jenisnya mulai dari abalone hingga teripang.

Masifnya komoditas yang diekspor Indonesia tersebut tentunya tidak mengherankan jika neraca perdagangan hasil perikanan Indonesia pun bernilai tinggi (Lihat Gambar 6). Tercatat mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2021 nilai tersebut selalu meningkat dengan total naik sebesar 6,32% per tahunnya (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2022).

Gambar 6. Neraca Perdagangan Hasil Perikanan 2017 – 2021



Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan (2022)

Nilai neraca perdagangan yang meningkat tiap tahunnya tersebut tentu saja berpengaruh secara signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) subsektor perikanan di Indonesia. Hal ini disebabkan nilai ekspor yang berhubungan erat dengan permintaan (*demand*) dari pasar global akan berkaitan erat dengan kesejahteraan nelayan serta permintaan komoditas ikan yang akan terus meningkat dari tahun ke tahun yang kemudian akan berdampak pada PDB subsektor perikanan (Hilwa, 2017). Dengan kata lain, jika aktivitas ekspor perikanan semakin baik, maka akan semakin mengembangkan industri perikanan di Indonesia.

Selain secara nasional, peran ekspor dalam industri perikanan dirasakan pula secara kedaerahan. Dilansir dari [jatengprov.go.id](http://jatengprov.go.id), Jawa Tengah memiliki wilayah pesisir yang tersebar di 17 kabupaten mulai dari utara hingga selatan Pulau Jawa yang dinilai memiliki potensi perekonomian yang sangat baik. Potensi tersebut datang dari peran ekspor di bidang kelautan dan perikanan meliputi perikanan tangkap dan juga budidaya. Komoditas perikanan budidaya di Jawa Tengah sendiri diungguli oleh udang, nila, lele, gurami, bandeng, kerapu, serta rumput laut. Tercatat pada 2022 terdapat 107 jenis varian komoditas yang diekspor dengan daging rajungan menempati jajaran pertama nilai ekspor perikanan senilai Rp 1,3 triliun dan 7.343-ton ikan layur yang membantu pertumbuhan perekonomian di pesisir Jawa Tengah pada tahun itu (Bidang IKP Provinsi Jawa Tengah, 2023).

Daerah lain yang memanfaatkan ekspor untuk meningkatkan industri perikanan mereka adalah Provinsi Kalimantan Tengah. Dilansir dari [mmc.kalteng.go.id](http://mmc.kalteng.go.id), Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran mengungkapkan bahwa perikanan lokal Kalteng memiliki potensi yang besar untuk diekspor ke luar negeri. Maka pada tahun 2022 kemarin, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meluncurkan secara resmi program Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan Kalteng dengan meliputi berbagai tindakan seperti mengoptimalkan *food estate*, membangun kawasan klaster tambak udang vaname (*shrimp estate*) serta percepatan pembangunan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus yang akan menunjang serta memperluas pasar ekspor. Selain itu, komoditas ikan lokal yang akan digunakan sebagai unggulan ekspor antara lain adalah ikan hias Botia, ikan Seluang, ikan Betutu, ikan Toman, ikan Sapu-sapu, ikan Lais, ikan Baung serta ikan Julung-julung. Jenis-jenis ikan ini telah menarik minat Singapura, Malaysia, Jepang, Thailand, Hongkong hingga Jerman untuk mengimpornya dari Indonesia. Para *stakeholder* yang hadir pada acara pelepasan tersebut pun berharap bahwa momentum ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dan tidak hanya sebagai seremonial saja, karena selain membantu perekonomian secara kedaerahan secara tidak langsung akan membantu perekonomian nasional (Wulandari, 2022)

Oleh karena itu, peran ekspor dalam meningkatkan industri perikanan di Indonesia sangat penting utamanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik secara nasional maupun kedaerahan. Selain itu, dengan terus meningkatnya nilai ekspor, maka semakin banyak pula bagian-bagian dari pelaku ekonomi seperti nelayan, distributor, eksportir, hingga konsumen yang akan terdampak secara positif yang akan membantu perekonomian Indonesia secara mikro hingga makro untuk terus berputar.

### **Potensi Pasar Ekspor Perikanan di Kawasan Asia Tenggara**

Dewasa ini, tujuan utama ekspor Indonesia dalam produk perikanan adalah Amerika Serikat, Jepang, dan Tiongkok dengan komoditas unggulan berupa Udang, Tuna-Cakalang (TCT) dan Cumi-Sotong-Gurita (CSG), serta Rajungan-Kepiting. Setelah ketiga negara tersebut, tujuan utama Indonesia adalah negara-negara Asia Tenggara. Mengingat lokasi dan hubungan erat Indonesia dengan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara membuka peluang yang besar untuk meningkatkan ekspor ke negara-negara tersebut. Berdasarkan penelitian oleh Rasyid (2015) ekspor ikan dan produk perikanan Indonesia masih terfokus pada negara maju. Tercatat, hampir separuh nilai ekspor ikan tertuju pada tiga negara tersebut (44,6%) dan negara-negara ASEAN hanya sampai seperempat dari total ekspor (26,4%). Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang menggunakan investasi indeks Herfindahl yang menyatakan bahwa hanya terdapat 10 negara yang menjadi tujuan ekspor ikan dan produk perikanan Indonesia. Hasil uji ini menandakan bahwa Indonesia masih belum menggarap pasar kawasan Asia Tenggara sebagai tujuan penting ekspor ikan.

Selain berdasarkan uji Herfindahl, uji regresi menjelaskan faktor yang sangat mempengaruhi nilai ekspor adalah faktor luasnya pasar. Jika pasar tujuan berkembang, maka nilai ekspor pun akan meningkat. Hasil uji menunjukkan bahwa faktor-faktor moneter seperti inflasi serta pertumbuhan negara tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap ekspor. Kondisi ekonomi makro global yang dinamis tidak banyak mempengaruhi permintaan industri perikanan. Titik inilah yang seharusnya dimanfaatkan Indonesia untuk memanfaatkan ekspor sebagai sumber devisa yang stabil.

Potensi dan kesempatan ini mulai menjadi perhatian Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2016 karena pada saat itu Indonesia masih menduduki posisi ketiga sebagai industri pengolahan ikan terbesar di Asia Tenggara dengan posisi pertama diduduki oleh Thailand dan kedua oleh Filipina. Namun, situasi itu mulai berubah karena kekuatan industri perikanan di Asia Tenggara mulai bergeser ke Indonesia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ikan-ikan yang diolah di Thailand dan Filipina merupakan hasil tangkapan dari perairan Indonesia. Menteri KKP saat itu Susi Pudjiastuti menyatakan bahwa lemahnya penegakan hukum terhadap *illegal fishing* di perairan Indonesia membuat kedua negara tersebut dengan bebas untuk berlayar dan menangkap ikan. Lebih buruknya lagi, ikan-ikan yang kedua negara tersebut ambil dari Indonesia dan diekspor kembali ke Indonesia. Kondisi ini sangat tragis karena kita membeli ikan yang mereka ambil dari perairan kita sendiri. Oleh karena itu, tindakan yang diambil oleh KKP untuk mengubah kondisi ini dengan menerapkan kebijakan moratorium perizinan kapal asing dan larangan bongkar muat ikan di tengah laut (*transshipment*). Hal ini menyebabkan kinerja industri perikanan di kedua negara mulai menurun dan nelayan-nelayan di Indonesia mulai merasakan manfaatnya. Hingga akhirnya, pola yang dilakukan oleh Thailand dan Filipina kini mengajukan permohonan membuka pabrik pengolahan ikan di Indonesia, tidak lagi mengambil secara sembarang ikan di perairan Indonesia (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2016).

Sejak diberlakukannya kebijakan-kebijakan tersebut, ekspor perikanan Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun beriringan dengan nilai produksi serta konsumsi. Kenaikan produksi dan perdagangan membuat porsi pajak dari sektor perikanan pun naik. Tidak hanya bagi tiga negara maju sebagai tujuan utama, bagi kawasan Asia Tenggara pun nilai ini terus meningkat 3-8% setiap tahunnya (Finaka & Putra, 2017). Bahkan ketika pandemi COVID-19 berlangsung, sejak Januari hingga Oktober 2021, komoditas udang menyumbang 40% total ekspor perikanan, TCT sebesar 13%, rajungan-kepiting 11%, CSG 10% dan rumput laut sebesar 6% (Angelia, 2022). Dengan demikian, besar potensi pasar

ekspor perikanan di kawasan Asia Tenggara bagi Indonesia. Karena, selain untuk mencapai posisi pertama dalam industri perikanan di kawasan Asia Tenggara, melalui perikanan pula lah tujuan-tujuan negara yang tertulis dalam setiap rancangan kebijakan ekonomi dan lain sebagainya akan tercapai sedikit demi sedikit.

### **Kebijakan dan Strategi Ekspor Berbasis *Blue Economy* di Indonesia**

Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa konsep dari *blue economy* adalah meningkatkan hasil perikanan dengan memperhitungkan keberlanjutan (*sustainability*) dari hasil perikanan itu sendiri. Tujuan dari *blue economy* ini juga selaras dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), tepatnya pada poin 14 yaitu pelestarian ekosistem laut. Indonesia yang merupakan negara kepulauan tentu memiliki fokus untuk melakukan pembangunan dalam sektor kelautan, yang mana akhirnya diadopsinya konsep *blue economy* tersebut pada kebijakan kelautannya. Pasca diadakannya KTT Rio+20 pada tahun 2012 yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan, pemerintah Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Menyusun pembangunan kelautan berkelanjutan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (RPJPN) (Ismail & E., 2019). Rancangan tersebut dibagi ke dalam beberapa tahap bernama Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) setiap lima tahun dengan sasarannya masing-masing.

Dalam penelitiannya, Polanunu & Kusumaningrum (2022) memaparkan tujuan dari RPJM Nasional I hingga IV yang bersumber pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, dimana secara umum tujuan dari RPJM adalah menata ulang segala aspek yang dimiliki oleh Indonesia dan memantapkan pembangunan atas penataan ulang tersebut untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri dan sejahtera. Melanjutkan RPJPN dan RPJM tersebut, Presiden Joko Widodo juga mencetuskan “Visi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2030” sebagai implementasi rencana pembangunan yang telah dibuat.

Pada RPJM Nasional III disebutkan tujuan pembangunan secara komprehensif dalam segala bidang dengan fokus keunggulan sumber daya alam, keunggulan sumber daya manusia, dan penguasaan ilmu pengetahuan & teknologi yang mana akhirnya memiliki landasan hukum Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017. Selaras dengan tujuan ini serta konsep *blue economy*, Indonesia memprioritaskan pembangunan sektor kelautan agar dapat memanfaatkan kemampuan sesuai dengan potensinya yang tidak terbatas. Peraturan tersebut dapat dituangkan ke dalam tujuh pilar kebijakan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya laut dan SDM; (2) pertahanan, keamanan, penegakan hukum dan keselamatan di laut; (3) tata kelola dan kelembagaan laut; (4) ekonomi dan infrastruktur kelautan; (5) pengelolaan dan perlindungan ruang laut; (6) budaya Bahari; dan (7) diplomasi maritim.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, ditemukan empat aspek *blue economy* yang dapat diterapkan dalam kebijakan ekspor perikanan Indonesia yang dikembangkan oleh Sari dan Muslimah (2020): (1) *Innovation and technology*, (2) *Ecosystem and environment sustainability*, (3) *Alignment in fishermen and fish farmers*, dan (4) *Research and development*. Melalui keempat basis aspek *blue economy* ini, akan diklasifikasikan kebijakan maupun strategi apa saja yang telah dilakukan oleh Indonesia untuk meningkatkan ekspor sektor perikanan khususnya di kawasan Asia Tenggara sebagai berikut:

#### ***Innovation and technology***

Kontribusi bidang inovasi dan teknologi dalam memperkuat kebijakan dan strategi ekspor perikanan di Indonesia telah berkembang dari tahun ke tahun. Fokus Indonesia untuk menggunakan teknologi dalam peningkatan kualitas perikanan dan kelautan ditandai dengan adanya *Indonesia Ocean Policy* di tahun 2017. Secara strategis, Indonesia memfokuskan terhadap perkembangan kapabilitas pertahanan dan keamanan dengan memaksimalkan alutsista TNI AL. Secara ekonomi, Indonesia akan mengembangkan pelabuhan, perikanan, dan kapasitas pelayaran untuk meningkatkan ekspor serta meningkatkan perekonomian pulau-pulau terluar. Di bawah pimpinan Susi Pudjiastuti, KKP memfokuskan kebijakan

mencakup melarang pukat secara nasional, menangani penangkapan ilegal oleh kapal asing, menetapkan batas ukuran minimum baru untuk lobster, kepiting, rajungan, dan lain sebagainya. Untuk menunjang keamanan kapal domestik, dalam *Ocean Conference* di New York tahun 2017, KKP meminta negara lain untuk membagikan data *Vessel Monitoring System* (VMS) negara lain untuk memperkuat transparansi dan memerangi penangkapan ilegal. Pada Juli 2017, melalui *Global Fishing Watch* (GFW), Indonesia menjadi negara pertama yang membagikan data VMS-nya (California Environmental Associates, 2018, p. 30).

VMS juga *Automatic Identification System* (AIS) merupakan dua alat untuk melacak kapal secara global. Cara kerja kedua alat ini sebagai alat ‘*situational awareness*’ yang memungkinkan kapal untuk bertukar data dua arah secara elektronik hampir secara *real-time*, balik dari kapal ke kapal atau dari pantai ke kapal dan tidak dipungut biaya per-pesan dalam AIS. VMS bekerja sebagai sistem komunikasi berbasis satelit yang memungkinkan kapal mengirim pesan dua arah (baik manual atau terjadwal) untuk mengirimkan data satu arah hampir secara *real-time* dan terdapat biaya per-sinyal antara kapal dan otoritas maritim terkait (California Environmental Associates, 2018, p. 34). Dengan kedua teknologi inilah, kapal-kapal asing yang ilegal dapat terdeteksi dan meningkatkan keamanan bagi kapal-kapal domestik yang berlayar.

Selain itu, dalam pengelolaan perikanan tangkap secara nasional, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengeluarkan Kepmen Nomor 50 tahun 2017 yang mengatur tentang perkiraan potensi, jumlah tangkapan yang diizinkan, dan tingkat pemanfaatan Sumber Daya Ikan (SDI) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI). Dalam rangka memenuhi mandat tersebut, Komisi Nasional Pengkajian SDI (Komnas KAJISKAN) telah menghitung estimasi *maximum sustainable yield* (MSY) sebagai potensi SDI nasional, dengan jumlah sekitar 12,5 juta ton per tahun. Meskipun angka ini bersifat dinamis karena karakteristik pergerakan ikan yang selalu berubah-ubah.

Oleh karena itu, diperlukan metode perhitungan yang lebih akurat untuk menggambarkan potensi sebenarnya dari ikan di 11 WPPRI. Dalam hal ini, teknologi akustik tomografi merupakan solusi yang memungkinkan. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) memiliki kemampuan untuk mengembangkan sistem deteksi ikan yang dapat secara spasial menghitung jumlah ikan di dalam kolom air laut. Teknologi akustik tomografi ini dapat diterapkan di setiap WPPRI dan memungkinkan pemantauan langsung terhadap ketersediaan ikan dari waktu ke waktu. Inovasi teknologi ini merupakan terobosan baru dalam perhitungan sumber daya ikan secara nasional, serta akan meningkatkan kemandirian dan keunggulan teknologi Indonesia di bidang perikanan global. BPPT, LAPAN, dan KKP telah lama mengembangkan sistem pemantauan wilayah tangkapan ikan (*fishing ground*) berbasis teknologi penginderaan jauh. Produk Sikbes-Ikan BPPT menggunakan parameter suhu, salinitas, dan arus laut yang diperoleh dari satelit penginderaan jauh, dan berhasil memberikan prediksi lokasi tangkapan ikan dengan menggunakan sistem pengetahuan berbasis data yang ada (Syamsudin, 2020).

Inovasi lainnya yang dilakukan untuk memaksimalkan perikanan tangkap secara nasional adalah melalui metode budidaya adalah dengan menerapkan Keramba Jaring Apung Lepas atau KJA *Offshore*. Program ini merupakan program strategis KKP untuk meningkatkan produksi ikan laut khususnya ikan Kakap Putih yang mengadopsi teknologi budidaya di Norwegia. KJA sendiri memiliki kedalaman jaring hingga 15-meter dan mampu ditebar lebih banyak benih sekitar 1,2 juta per tahun untuk 8 lubang. Dengan demikian, nilai produksi akan lebih tinggi dan diprediksikan akan mencapai 816 ton per tahun per unit KJA. Hasil ikan Kakap Putih dari KJA *Offshore* akan diproses dalam bentuk *fillet* maupun *frozen*. Sejauh ini, pembangunan KJA *Offshore* dilakukan oleh PT Perikanan Nusantara dan KJA *Offshore* Pangandaran sebagai wilayah yang paling cepat dalam proses pembangunannya (Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2018). Harapannya, KJA *Offshore* ini dapat diterapkan di seluruh

wilayah produktif penangkapan ikan laut di Indonesia yang tentunya akan mendukung produktivitas nelayan dan jumlah tangkapan ikan yang dikumpulkan untuk di ekspor.

### *Ecosystem and environment sustainability*

Dalam bidang ekosistem dan lingkungan yang berkelanjutan, beberapa strategi telah dilakukan oleh berbagai *stakeholder* untuk mendukung dibentuknya kebijakan yang mengatur penyimpanan ikan dan pengembangan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Salah satunya adalah kerja sama yang dilakukan oleh Yayasan IPNLF Indonesia (YII), *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit* (GIZ Indonesia), serta mitra rantai pasokan tuna satu-per-satu YII, yaitu PT. AIREF dan PT. Aneka Sumber Tata Bahari (PT. ASTB), di Desa Kawa, Seram Bagian Barat, Maluku, Indonesia dalam melakukan proyek '*Solar Ice Maker*'. Proyek inovatif dan ramah lingkungan '*Solar Ice Maker*' di Indonesia bertujuan untuk memberikan perubahan transformasional dengan menggunakan mesin pembuat es tenaga surya yang tidak bergantung pada jaringan listrik, di komunitas nelayan terpencil di Indonesia Timur yang memproduksi ikan tuna sirip kuning berkualitas untuk pasar bernilai tinggi.

*Solar ice maker* adalah teknologi baru yang dapat menghasilkan es dengan standar industri melalui sistem yang sepenuhnya mandiri dari jaringan listrik. Teknologi ini sebelumnya telah berhasil diimplementasikan oleh GIZ Indonesia di Desa Sulamu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kunjungan terbaru ini dilakukan untuk mengumpulkan semua mitra proyek dan melihat lokasi instalasi pertama, serta setiap mitra memberikan saran berdasarkan bidang keahlian masing-masing. Selama kunjungan ke Maluku, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku (DKP Maluku) dan Dinas Kelautan dan Perikanan Seram Bagian Barat (DKP SBB), yang sangat mendukung proyek ini, membantu memfasilitasi pertemuan pengenalan dengan masyarakat setempat. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk Meningkatkan konsistensi pasokan es untuk meningkatkan kualitas tangkapan dan akses pasar bagi perikanan skala kecil; perbaikan *cold chain* serta mengurangi kerugian pasca panen; dan menciptakan '*proof of concept*' dari *solar ice maker*. Implementasi yang berhasil dari sistem tanpa baterai, secara efektif mengurangi salah satu biaya besar dari sistem tenaga surya yang saat ini ada (IPLNF, 2022).

Secara kedaerahan, Kabupaten Cilacap merupakan salah satu daerah yang berkontribusi dalam mendukung ekspor perikanan di Indonesia melalui program-program yang didukung oleh Dinas Perikanan dan BKMG daerah. Dalam rangka peningkatan hasil laut, dilakukan upaya-upaya terkait permesinan kapal, alat tangkap, dan alat bantu penangkapan. Dengan menjunjung nilai ramah kepada lingkungan, banyak kembangkan modifikasi alat penangkapan ikan yang lebih ramah lingkungan karena mayoritas alat penangkap ikan yang digunakan masih memiliki dampak yang merugikan bagi lingkungan. Salah satu alat penangkap ikan yang ramah lingkungan yang dikembangkan dan digunakan oleh nelayan-nelayan di Cilacap adalah *Trammel Net* atau Jaring Sirang dengan jenis ikan yang ditangkap adalah ikan belanak.

Pada tahun 2019, untuk mengimplementasikan penggunaan alat ini secara luas, didukung oleh pemerintah melalui Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap menyelenggarakan pelatihan pembuatan alat penangkap ikan jaring *Trammel Net*. Pelatihan pembuatan alat penangkap ikan jaring *Trammel Net* ini dilaksanakan di Desa Kaliwungu, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap. Tujuan yang dilakukan dalam pelatihan pembuatan alat penangkap ikan jaring *Trammel Net* adalah untuk memperkenalkan kepada nelayan, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada nelayan tentang alat penangkap ikan jaring *Trammel Net* dan praktik pembuatannya. Diharapkan setelah mengikuti pelatihan, nelayan/peserta pelatihan mampu membuat alat penangkap ikan jaring *Trammel Net* sendiri sehingga mengurangi biaya pengeluaran operasional karena telah dilengkapi untuk dapat membuat dan memperbaiki jaring sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, diselenggarakan pula Sekolah Lapang Nelayan (SLN) oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). SLN diikuti oleh 25

peserta dari kalangan perikanan dan nelayan di Kabupaten Cilacap dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mengakses informasi cuaca maritim sehingga dapat menciptakan peningkatan ekonomi dan keamanan. Selain itu, kegiatan SLN juga bertujuan untuk memanfaatkan data dan informasi dari BMKG secara lebih optimal guna meningkatkan hasil tangkapan nelayan (Tiyaningsih, Suyitno, & Saddhono, 2020). Bentuk dukungan dari pemerintah daerah ini menunjukkan bahwa secara kedaerahan, para *policymakers* telah menyimpan perhatian mereka dalam mengatur sektor perikanan melalui pendidikan dan pelatihan bagi nelayan.

### ***Alignment in fishermen and fish farmers***

Pada tanggal 6 Maret 2023, pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Beberapa poin penting dalam kebijakan ini adalah mengenai kuota penangkapan ikan. Adanya kuota ini menjamin agar pemanfaatan sumber daya ikan sesuai dengan daya dukung yang ada. Selain itu, dalam PIT terdapat poin mengenai zona penangkapan ikan. Zona penangkapan ikan ditujukan untuk mencapai kesejahteraan penduduk pesisir dan nelayan di wilayah sekitar yang inklusif. Ketiga, dalam PIT pun diatur mengenai pengawasan kapal-kapal perikanan dan jumlah optimum kapal diharapkan akan mengikuti seluruh ketentuan yang berlaku. Keempat, aturan ini mengatur tentang penarikan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) pascaproduksi. Hal ini dilakukan karena akan menjamin keadilan atas dasar sumber daya alam yang akan digunakan masuk ke penerimaan negara. Pendapatan ini tentunya akan digunakan kembali untuk membiayai pembangunan khususnya di sektor perikanan. Dilansir dari detikfinance, Ukon Ahmad Furkon, Direktur Perizinan dan Kenelayan Ditjen Perikanan Tangkap KKP menyampaikan bahwa dengan adanya PIT ini akan memberikan manfaat yang sangat berguna bagi keberlanjutan dan kesejahteraan pelaku usaha di wilayah pesisir. Selain itu, Ukon menyampaikan bahwa dalam PIT, para nelayan kecil akan mendapatkan berbagai keistimewaan dalam tata kelola perikanan Indonesia (Brilian, 2023).

Namun, berdasarkan Ringkasan Eksekutif Kertas Kerja terhadap Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur oleh KORAL (Koalisi NGO untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan) kebijakan ini dinilai bukan hal baru karena hanya memperburuk tata kelola sumber daya perikanan sejak periode Orde Baru karena hanya berfokus di (a) volume hasil tangkapan dengan *share* di pasar internasional, (b) pertumbuhan ekonomi sektor perikanan hanya difokuskan mengenai belanja bukan investasi, (c) struktur industri perikanan Indonesia yang masih mengalami kesenjangan yang sangat signifikan, serta (d) indeks kesejahteraan masyarakat di sektor kelautan dan perikanan setiap tahun meningkat namun nelayan kecil masih selalu miskin. Selain itu, dari analisis PP PIT, penetapan zona WPP-NRI hanya berorientasi ekspor dan perikanan dengan skala besar saja dan zona perikanan lokal hanya diterapkan di WPP-NRI 571, 712, dan 713 sehingga mengabaikan potensi WPP-NRI lainnya. Penerapan sistem kuota ini juga di Indonesia tidak memiliki latar belakang yang kuat serta pengalaman yang faktual di mana memicu perburuan elit politik karena sistem ini bisa diperjualbelikan. Sistem ini akan mengancam proyek lumbung ikan nasional (LIN) yang akan menimbulkan masalah baru karena LIN tidak berorientasi eksploitasi namun mengamankan dan menjamin keberlanjutan stok ikan (KORAL Indonesia, 2022).

Dengan demikian, dari model *alignment with fisherman and fish farmers*, Indonesia belum bisa mencapai keselarasan yang seharusnya menjadi tujuan utama dari penerapan *blue economy* itu sendiri. Selain itu, ekspor merupakan hal yang penting dalam meningkatkan perekonomian dari industri perikanan, namun jika tidak adanya keselarasan dengan nelayan juga pelaku usaha di dalam industri tersebut maka prinsip *blue economy* yang menjadi dasar kebijakan tidak dapat tercapai dengan baik.

### **Research and development**

Di bidang riset, penerapan *blue economy* telah menjadi fokus yang akan dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2022. Kegiatan riset dan inovasi memiliki fungsi strategis untuk menyediakan dasar ilmiah serta sumber daya manusia yang berkualitas untuk penerapan kebijakan-kebijakan serta program prioritas KKP. Beberapa penerapan tersebut adalah diwujudkan dengan adanya PP PIT, pengembangan budidaya berbasis pada ekspor, pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal. Secara riset sendiri, KKP memfokuskan pada pengembangan karbon biru, zonasi budidaya perikanan, pemetaan wilayah pesisir, ekosistem *mangrove* serta terumbu karang.

Ada beberapa program riset lain yang dinilai sukses, seperti penelitian yang terintegrasi untuk mengatasi abrasi dan banjir rob di wilayah Pantai Utara Jawa, pengembangan kampung perikanan yang mengadopsi teknologi 4.0, penyebaran hasil penelitian tentang arkeologi maritim yang berkaitan dengan situs "kapal tenggelam" untuk pengelolaan pariwisata bahari yang berkelanjutan, serta upaya memperkuat narasi sejarah dan budaya maritim. I Nyoman Radiarta, Kepala Pusat Riset Kelautan, menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2021, telah diberikan 18 rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil penelitian di bidang perikanan. Selain itu, telah dipublikasikan 243 karya tulis ilmiah tentang riset perikanan, dan telah dikembangkan 17 teknologi hasil penelitian di bidang perikanan. Selain itu, juga dilakukan penelitian penilaian stok sumber daya perikanan di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dan 5 Kawasan Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan (KPPUD) untuk memberikan informasi tentang stok sumber daya perikanan (Ambari, 2021).

Selain itu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Syahailatua (2022, p. 3) riset iktioplankton dapat menunjang kelestarian sumber daya ikan yang mampu dimanfaatkan secara optimal serta diversitasnya tetap lestari. Riset iktioplankton di Indonesia sudah dimulai sejak awal abad ke-20, yakni sekitar tahun 1920-an. Sejak saat itu hingga tahun 1999, aspek risetnya masih terbatas pada kajian diversitas, distribusi dan kelimpahan telur dan larva ikan. Berdasarkan perkembangan riset iktioplankton di Indonesia, maka penulis mengelompokkan perkembangan risetnya dalam dua periode besar, yaitu pertama pada tahun 1921-1999 sebagai Periode Riset Eksplorasi Iktioplankton, dan kedua pada tahun 2000-sampai saat ini sebagai Periode Pengembangan Riset Iktioplankton. Dari sejumlah riset iktioplankton ada beberapa hasil capaian signifikan. Dari 6 kali pelayaran survei, tercatat 6 spesies larva ikan sidat tropis yang teridentifikasi dan terkonfirmasi melalui analisis genetika (DNA). Ini merupakan jumlah spesies yang tertinggi dibandingkan dengan perairan lain di dunia. Di samping itu, juga terindikasi kemungkinan lokasi pemijahan tuna di sekitar Kepulauan Lease dan Kepulauan Banda.

Namun, meski sudah berumur satu abad, riwayat riset iktioplankton di Indonesia hasilnya masih sangat terbatas sehingga informasi serta data pun masih sangat sulit untuk ditemukan. Sejauh ini pengelolaan sumber daya ikan melalui riset ini pun masih belum optimal. Bentuk riset ini harus didukung oleh seluruh *stakeholder* dan *shareholder* untuk menyediakan fasilitas kapal riset dan peralatan laboratorium terbaru agar riset berjalan dengan lancar. Dengan demikian, riset berbasis iktioplankton ini dapat mendukung diversifikasi komoditas ikan lainnya untuk diekspor kemudian hari.

### **Analisis Potensi Kebijakan Ekspor Berbasis *Blue Economy* di Industri Perikanan Indonesia**

Berdasarkan proses perumusan kebijakan luar negeri oleh Gimba dan Ibrahim (2018), dalam proses yang pertama yaitu asesmen kondisi politik internasional dan domestik, Indonesia sendiri telah memosisikan sebagai negara maritim dan kepulauan dengan sumber dayanya mampu digunakan untuk menunjang perekonomian negara, termasuk dalam ekspor dari industri perikanan. Dengan komoditas utama adalah udang, ikan, cumi, gurita, rumput laut dan kepiting Indonesia telah mampu mengekspor ke Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok dan tentunya negara-negara di Asia Tenggara. Meskipun berada di bawah Thailand dan Filipina, industri perikanan Asia Tenggara mulai bergeser ke Indonesia. Maka dari itu, sudah semestinya lapisan di lembaga eksekutif memberi perhatian pada kesempatan ini untuk

memfasilitasi para pelaku ekonomi agar bisa memaksimalkan potensi perikanan yang dimiliki. Kedua, mengenai *goal setting*, di tahun 2016 saat kepemimpinan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk merekonstruksi fokus industri perikanan di Indonesia, dimulai dengan penegakan hukum atas *illegal fishing*, memberdayakan nelayan, hingga bekerjasama dengan pihak lainnya sebagai pelaku ekonomi di bidang perikanan. Di masa kepemimpinan beliau, tujuan perikanan dan kelautan Indonesia sangat diperhatikan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi secara nasional dan mampu berdampak bagi perdagangan internasional.

Ketiga, mengenai pertimbangan mengenai pilihan kebijakan, Indonesia sejauh ini dalam berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas ekspor perikanan telah mengacu kepada aspek-aspek *blue economy*. Di bidang inovasi dan teknologi, telah adanya *Indonesia Ocean Policy*, mengeluarkan kebijakan penggunaan pukat, menunjang keamanan kapal domestik dengan *Vessel Monitoring System (VMS)* dan *Automatic Identification System (AIS)* serta menerapkan *KJA Offshore*. Di bidang *ecosystem and environment sustainability*, berbagai kerja sama untuk memberikan perubahan transformasional, melakukan inovasi ramah lingkungan untuk mengurangi kerugian pascapanen ikan, dan menciptakan alat penangkapan ikan ramah lingkungan, mampu mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan. Kemudian, pada model *alignment with fisherman and fish farmers*, penerapan kebijakan PIT dapat memberikan manfaat yang berguna bagi keberlanjutan dan kesejahteraan pelaku usaha di wilayah pesisir. Selanjutnya, melalui model *research and development*, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memfokuskan pada penelitian dan inovasi dalam menerapkan ekonomi biru. Beberapa program riset telah dilakukan, seperti pengembangan karbon biru, zonasi budidaya perikanan, pemetaan wilayah pesisir, dan penilaian stok sumber daya perikanan. Meskipun telah ada hasil capaian yang signifikan, masih terdapat keterbatasan dalam riset iktioplankton di Indonesia.

Keempat, dalam menentukan aktor yang menyusun kebijakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan tentunya merupakan aktor utama dalam merumuskan berbagai kebijakan yang menunjang ekspor perikanan di Indonesia. Proses penyusunan ini tentunya harus didukung oleh berbagai sektor yang inklusif, di mulai dari nelayan itu sendiri, asosiasi nelayan di Indonesia, koordinasi dengan Dinas Perikanan dan Kelautan setiap kabupaten dan kota, akademisi dan ahli di bidang kelautan dan perikanan, dan pihak lainnya sebagai ‘penentu’ efektivitas kebijakan. Akan tetapi, Indonesia belum bisa mencapai keselarasan antar aktor yang seharusnya menjadi tujuan utama dari penerapan *blue economy* itu sendiri. Terakhir, dari implementasi kebijakan terpilih akan menghadapi berbagai tantangan mulai dari anggaran, infrastruktur, potensi korupsi, kurangnya pengawasan serta tidak transparannya hasil dari implementasi kebijakan. Hal ini terlihat pada penerapan *Indonesia Ocean Policy/Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI)*, berdasarkan penelitian Putri et al., (2018), belum ada produk formal khusus mengenai upaya implementasi Rencana Aksi KKI di rentang tahun pertama kebijakan ini (2016 – 2019) untuk menjelaskan capaian apa saja yang diperoleh. Sejauh ini, proses implementasi kebijakan selebihnya diserahkan ke pemerintah daerah masing-masing.

Proses ini menunjukkan bahwa secara ‘*individual-level preference*’ dalam kebijakan ekonomi luar negeri, Indonesia belum bisa memposisikan industri perikanan sebagai salah satu determinan penting perdagangan internasional. Hal ini menurut (Bearce, 2021) dapat disebabkan oleh isu perdagangan internasional tidak menjadi hal penting bagi sebagian besar individu yang menyebabkan para pelaku ekonomi termasuk warga negara tidak memahami biaya dan manfaat dari perdagangan internasional. Sehingga, kebijakan yang disusun hanya dipermukaan saja seperti dalam KKI, salah satu pilar kebijakan yang difokuskan adalah diplomasi maritim yang dilakukan oleh di level eksekutif.

## KESIMPULAN

Dalam menganalisis kebijakan ekspor perikanan Indonesia berdasarkan empat model *blue economy* yang dikembangkan oleh Sari dan Muslimah (2020), terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Di bidang inovasi dan teknologi (*innovation and technology*), sektor ini masih memerlukan adanya anggaran, infrastruktur, dan tenaga ahli yang memadai. Selain itu perlunya pemantauan dan penegakan hukum yang efektif dan pemerintah perlu memastikan teknologi ini dapat diakses oleh setiap pihak yang terlibat dalam sektor perikanan. Di bidang *ecosystem and environment sustainability*, berbagai upaya telah dilakukan untuk menciptakan ekosistem penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Namun, perlu adanya peningkatan skala jangkauan proyek-proyek ini dan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta agar manfaat kebijakan ini dapat menjangkau skala yang lebih luas.

Kemudian, di bidang *alignment with fisherman and fish farmers*, Indonesia masih belum mencapai keselarasan dengan nelayan. Potensi keberlanjutan dan keberlanjutan stok ikan nasional juga menjadi perhatian dengan adanya sistem kuota yang rentan terhadap perburuan elit politik. Terakhir di bidang *research and development*, dukungan dari semua pihak, termasuk *stakeholder* dan *policymakers*, sangat diperlukan untuk mendukung diversifikasi komoditas ikan untuk ekspor di masa depan. Serta, dalam proses perumusan kebijakan ekspor perikanan, Indonesia masih harus melalui perjalanan panjang untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang inklusif dan bermanfaat bagi negara serta arena internasional.

Secara keseluruhan, potensi dan strategi yang telah berjalan sesuai dengan empat model tersebut dapat menjadi langkah awal yang penting untuk menunjang kebijakan ekspor industri perikanan Indonesia di Asia Tenggara. Namun, tantangan dan hambatan seperti persaingan dengan negara-negara lain, perubahan iklim, dan pengelolaan yang belum optimal harus diatasi melalui kerja sama melalui langkah-langkah strategis seperti penguatan rantai pasok, peningkatan kualitas produk, peningkatan nilai tambah melalui inovasi, pembangunan infrastruktur yang memadai, dan promosi yang efektif di pasar internasional. Dengan melibatkan semua *stakeholders* dan memperkuat riset serta inovasi, diharapkan industri perikanan Indonesia dapat meningkatkan daya saingnya, mencapai keberlanjutan, serta memperluas pangsa pasar ekspor di Asia Tenggara sejalan dengan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir yang terus diperhatikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambari, M. (2019, October). *Perikanan Jadi Penggerak Utama Ekonomi Nasional*. Retrieved May 27, 2023, from Mongabay: <https://www.mongabay.co.id/2019/10/01/perikanan-jadi-penggerak-utama-ekonomi-nasional/>
- Adiprayoga, S. N., & Samiaji, J. (2021). Opportunities and Strategies for the Blue Economy through the Empowerment of Sumatera Coastal Communities in Supporting the Realization of the National Food Security. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 934(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/934/1/012039>
- Ambari, M. (2021, December). *Fokus Kegiatan Riset Kelautan dan Perikanan: Ekonomi Biru*. Retrieved May 30, 2023, from Mongabay: <https://www.mongabay.co.id/2021/12/15/fokus-kegiatan-ri-set-kelautan-dan-perikanan-ekonomi-biru/>
- Angelia, D. (2022, January). *Eksistensi Kekayaan Sumber Daya Laut Indonesia di Tengah Pandemi*. Retrieved May 29, 2023, from Good News From Indonesia: <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2022/01/21/eksistensi-kekayaan-sumber-daya-laut-indonesia-di-tengah-pandemi>
- Aris, T., Mamahit, D. A., & Ras, A. R. (2022). Indonesian Salt Import Policy as A Threat and Opportunity in The Concept of Blue Economy in Indonesia. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 15(1), 1–13. <https://doi.org/10.21107/pamator.v15i1.14239>
- ASEAN. (n.d.). *Fisheries*. Retrieved March 6, 2023, from ASEAN Investment: <https://investasean.asean.org/fisheries>
- Bearce, D. H. (2021). Foreign Economic Policy. In *The Oxford Handbook of International Political*

- Economy*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198793519.013.39>
- Bidang IKP Provinsi Jawa Tengah. (2023, March). *Potensial Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Jateng Dorong Optimalisasi Sektor Kelautan dan Perikanan*. Retrieved May 29, 2023, from Portal Berita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah: <https://jatengprov.go.id/publik/potensial-tingkatkan-pertumbuhan-ekonomi-jateng-dorong-optimalisasi-sektor-kelautan-dan-perikanan/>
- Bojang, A. S.. (2018). The Study of Foreign Policy in International Relations. *Journal of Political Sciences & Public Affairs*, 6(4), 1-9. doi:10.4172/2332-0761.1000337
- Brilian, A. P. (2023, April). *Ini Poin Penting Aturan Penangkapan Ikan Terukur, Bikin Nelayan Happy?* Retrieved May 30, 2023, from detikfinance: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6655640/ini-poin-penting-aturan-penangkapan-ikan-terukur-bikin-nelayan-happy/1>
- California Environmental Associates. (2018). *Trends in Marine Resources and Fisheries Management in Indonesia: A 2018 Review*. California: California Environmental Associates.
- Chan, C. Y., Tran, N., Dao, D. C., Sulser, T. B., Philips, M. J., Batka, M., . . . Preston, N. (2017). *Fish to 2050 in the ASEAN region. (2017-01)*. Penang, Malaysia: WorldFish and Washington DC, USA: International Food Policy Research Institute (IFPRI).
- Costa, J. A., Freitas, B. C., Lisboa, C. R., Santos, T. D., Bruschi, L. R., & Morais, M. G. (2019). Microalgal biorefinery from CO<sub>2</sub> and the effects under the Blue Economy. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 99, 58-95. doi:<https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.08.009>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publications.
- Elia, A., & Indrajaya, K. (2022). The Relationship Blue Economy, Fishery Development Sustainable and Production Fishery. *Journal of Positive School Psychology*, 6(6). doi:<https://journalppw.com/index.php/jpsp/article/view/7040>
- Finaka, A. W., & Putra, G. D. (2017). *Konsumsi dan Ekspor Perikanan Terus Meningkat*. Retrieved May 29, 2023, from Indonesiabaik.id: <https://indonesiabaik.id/infografis/konsumsi-dan-ekspor-perikanan-terus-meningkat>
- Gimba, Z., & Ibrahim, S. G. (2018). A Review of External Factors That Determine Foreign Policy Formulation. *Indo-Iranian Journal of Scientific Research (IIJSR)*, 2(1), 119-130. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/332720162\\_A\\_Review\\_of\\_External\\_Factors\\_That\\_Determine\\_Foreign\\_Policy\\_Formulation](https://www.researchgate.net/publication/332720162_A_Review_of_External_Factors_That_Determine_Foreign_Policy_Formulation)
- Given, L. M. (2008). *The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods*. California: SAGE Publications.
- Graziano, M., Alexander, K., Liesch, M., Lema, E., & Torres, J. A. (2019). Understanding an emerging economic discourse through regional analysis: Blue economy clusters in the U.S. Great Lakes basin. *Applied Geography*, 105, 111-123. doi:<https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2019.02.013>
- Herman. (2022, December 27). *Indonesia Sets \$7.6b Fishery Export Target for 2023*. Retrieved March 4, 2023, from Jakarta Globe: <https://jakartaglobe.id/business/indonesia-sets-76b-fishery-export-target-for-2023>
- Hilwa, N. L. (2017). Analisa Peran Sektor Perikanan Terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia Tahun 2002-2014. *Universitas Islam Indonesia*. Retrieved from <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/6436>
- HUMAS DITJEN PDSPKP. (2022, December 29). *Ekspor Perikanan Tumbuh 10,66% di 2022*. Retrieved March 5, 2023, from KKP | Kementerian Kelautan dan Perikanan: <https://kkp.go.id/djpdspkp/artikel/47840-ekspor-perikanan-tumbuh-10-66-di-2022>
- IDX Channel Insight (Director). (2023). *Nilai Ekspor Perikanan Tembus USD6,24 Miliar | 1ST SESSION CLOSING 27/02* [Motion Picture]. Retrieved May 21, 2023, from <https://youtu.be/sohLbqqpdwU>
- IPLNF. (2022). *EMPOWERING INDONESIAN FISHING COMMUNITIES THROUGH SOLAR ICE MAKER TECHNOLOGY*. Retrieved May 30, 2023, from IPLNF for One-by-One Fishers News: <https://ipnlf.org/empowering-indonesian-fishing-communities-through-solar-ice-maker-technology/>
- Ismail, H. A., & E., K. (2019). Peran Kemaritiman Indonesia di Mata Dunia. *Jurnal Sains dan Teknologi Maritim*, 20(1), 83-89.

- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2016, April). *Peta Industri Perikanan Asia Tenggara Mulai Bergeser*. Retrieved May 29, 2023, from Biro Kerja Sama dan Humas: <https://news.kkp.go.id/index.php/peta-industri-perikanan-asia-tenggara-mulai-bergeser/>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (Director). (2018). *Sustainable Blue Economy (Areas Of Action OOC 2018)* [Motion Picture]. Retrieved May 21, 2023, from <https://youtu.be/ycrYtISWzvA>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2022). *STATISTIK EKSPOR HASIL PERIKANAN TAHUN 2017 – 2021*. Retrieved May 27, 2023, from BUKU STATISTIK EKSPOR HASIL PERIKANAN TAHUN 2017 – 2021: [https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/A\\_PDS2/Tahun%202022/Buku/Buku%20Edit/Buku%20Ekspor%202017-2021\\_2022.pdf](https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/A_PDS2/Tahun%202022/Buku/Buku%20Edit/Buku%20Ekspor%202017-2021_2022.pdf)
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2018, April). *KJA Offshore: Membangun Industri Marikultur Modern*. Retrieved May 30, 2023, from Artikel GPR KOMINFO: [https://www.kominfo.go.id/content/detail/12948/kja-offshore-membangun-industri-marikultur-modern/0/artikel\\_gpr](https://www.kominfo.go.id/content/detail/12948/kja-offshore-membangun-industri-marikultur-modern/0/artikel_gpr)
- KORAL Indonesia. (2022). *Executive Summary Kertas Kerja KORAL 2022*. Retrieved from KORAL Indonesia: <https://www.walhi.or.id/uploads/buku/Executive%20Summary%20Kertas%20Kerja%20KORAL%202022.pdf>
- Nana, S. (2021). Mendefinisikan Ekonomi Kelautan Indonesia. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/351839672\\_Mendefinisikan\\_Ekonomi\\_Kelautan\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/351839672_Mendefinisikan_Ekonomi_Kelautan_Indonesia)
- Nasution, A. M., & Wicaksono, V. A. (2023). The Political Economy of Fisheries Development During Joko Widodo's Regime. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 14(2), 141–164. <https://doi.org/10.14710/politika.14.2.2023.141-164>
- Pauli, G. (2010). *The Blue Economy*. Paradigm Pubns.
- Phelan, A., Ruhanen, L., & Mair, J. (2020). Ecosystem services approach for community-based ecotourism: towards an equitable and sustainable blue economy. *Journal of Sustainable Tourism*, 28, 1665-1685. doi:<https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1747475>
- Polanunu, A. B., & Kusumaningrum, D. N. (2022). Indonesia sebagai Middle Power Strategi Niche Diplomacy dalam Manifestasi Pembangunan Kelautan Berkelanjutan Berbasis Blue Economy. *Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR)*, 4(2), 146-163. doi:10.24198/padjir.v4i2.36645
- Polanunu, A. D., & Kusumaningrum, D. N. (2022). Indonesia Sebagai Middle Power: Strategi Niche Diplomacy dalam Manifestasi Pembangunan Kelautan Berkelanjutan Berbasis Blue Economy. *Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR)*, 4(2), 146-163.
- Pradana, M. A. (2021). DAMPAK BLUE ECONOMY TERHADAP EKOSISTEM DI ASIA PASIFIK. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 5(2), 155-165. doi:<https://doi.org/10.33541/japs.v5i2.2542>
- Putri, S. R. K., Octavian, A., & Aritonang, S. (2018). Implementasi Kebijakan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia Dalam Perspektif Manajemen Pertahanan. *Jurnal Manajemen Pertahanan*, 4(1), 1–15.
- Rasyid, M. (2015). Potensi Ekonomi Ikan Dan Produk Perikanan Indonesia Dalam Lingkup Masyarakat Ekonomi ASEAN. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU & CALL FOR PAPERS UNISBANK*, 1-8. Retrieved from <https://www.neliti.com/publications/172457/potensi-ekonomi-ikan-dan-produk-perikanan-indonesia-dalam-lingkup-masyarakat-eko#cite>
- Razladova, O., & Nyoko, A. E. (2022). Blue Economy Development in Indonesia. *Journal of Management Small and Medium Enterprises*, 15(1), 89-105. doi:<https://dx.doi.org/10.35508/jom.v15i1.6516>
- Rudi, S. (2023). Public Policy in the Concept of Blue Economy for Anticipating Disasters in Indonesia. *BIO Web of Conferences*, 70, 1–9. <https://doi.org/10.1051/bioconf/20237004002>
- Sargent, D. (2017). Foreign Economic Policy. *Oxford Research Encyclopedias*, 1-32. doi:<https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199329175.013.52>
- Sari, D., & Muslimah, S. (2020). Blue economy policy for sustainable fisheries in Indonesia. *IOP Conf Series: Earth and Environmental Science*, 1-9. doi:doi:10.1088/1755-1315/423/1/012051

- Setiyowati, H., Nugroho, M., & Halik, A. (2022). Developing a Blue Economy in Depok West Java, Indonesia: Opportunities and Challenges of Neon Tetra Fish Cultivation. *Sustainability*, *14*(13028), 1-10.
- Smith, S. (1986). Theories of Foreign Policy: An Historical Overview. *Review of International Studies*, *12*(1), 13-29. Diambil kembali dari <https://www.jstor.org/stable/20097063>
- Syahailatua, A. (2022). Manfaat Riset Iktioplankton dalam Mendukung Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Indonesia. *Badan Riset dan Inovasi Nasional*. doi:<https://doi.org/10.55981/brin.715>
- Syamsudin, D. F. (2020, December). *Inovasi IPTEK Dalam Pengelolaan Perikanan Tangkap Nasional*. Retrieved May 30, 2023, from Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat: <http://dkp.sulbarprov.go.id/inovasi-ipitek-dalam-pengelolaan-perikanan-tangkap-nasional/>
- Tiyaningsih, T., Suyitno, & Saddhono, K. (2020). Sustainable Technology in Marine Fisheries in Cilacap Regency, Central Java, Indonesia. *International Journal of Design & Nature and Ecodynamics*, *15*(3), 401-407. doi:<https://doi.org/10.18280/ij dne.150313>
- World Bank . (2013). *Fish to 2030 : prospects for fisheries and aquaculture*. Retrieved from Agriculture and environmental services discussion paper: <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/458631468152376668/fish-to-2030-prospects-for-fisheries-and-aquaculture>
- World Bank. (2021, Maret 25). *Blue Economy: Sustainable Ocean Economy is Key to Indonesia's Prosperity*. Diambil kembali dari Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=ShTeK2JWgl0>
- Wu, C. S., Pasaribu, R. G. E. J., Azzahra, J. E., Heryadi, D., & Sari, D. S. (2023). PROSPEK DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA MELALUI POROS MARITIM DUNIA DALAM IMPLEMENTASI ASEAN BLUE ECONOMY. *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika*, *5*(2), 133–148
- Wulandari, B. (2022, February). *Gubernur Sugianto Sabran : Produk Perikanan Lokal Kalteng beragam dan miliki keunggulan untuk diekspor*. Retrieved May 29, 2023, from Multimedia Center Kalimantan Tengah: <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/37116/gubernur-sugianto-sabran-produk-perikanan-lokal-kalteng-beragam-dan-miliki-keunggulan-untuk-diekspor>
- Ziring, L., Plano, J., & Olton, R. (1995). *International Relations: A Political Dictionary*. California: ABC-CLIO.

## **BIOGRAFI**

**Selsya Shafa Khairunisaa**, Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran.

**Astricta Amalia Putri**, Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran.

**Deasy Silvyia Sari**, Dosen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran. Kepakaran regionalisme, kebijakan luar negeri, metode penelitian sosial kualitatif, dan analisis data kualitatif dalam Hubungan Internasional.